

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas.

Di Penyebaran virus COVID-19 (coronavirus Disease 2019) yang begitu cepati di indonesia telah memberikan pengaruh yang cukup besar bagi perekonomian indonesia, Lonjakan jumlah penderita dengan fatality rate yang tinggi dalam enam bulan terakhir, data akumulasi sejak 3 maret-desember 2020 sebanyak 818.000 kasus positif, 674.000 sembuh dan 23,947 meninggal. Sangat mengkhawatirkan dan menyebabkan kepanikan baik dikalangan pemerintahan, masyarakat, maupun dikalangan dunia usaha

Respon pemerintah dan masyarakat yang melakukan usaha, seperti penutupan sekolah, *work from home* khususnya para pekerja sektor formal, penundaan serta pembatalan berbagai eventevent pemerintah dan swasta, penghentian beberapa moda transportasi umum, dan pemberlakuan PSBB di berbagai daerah, larangan mudik, membuat roda perputaran ekonomi melambat.

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran tentang setiap ekonomi yang mampu dicapai oleh perusahaan pada saat periode tertentu melalui kegiatan kegiatan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien, yang dapat diukur

perkembangan nya dengan berbagai indikator dan salah satu sumber indikator yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting didalam mengetahui kondisi keuangan pemerintahan daerah. Melalui laporan keuangan dapat diperoleh informasi yang menyangkut posisi keuangan dan perubahannya sekaligus mencerminkan kinerja keuangan (Fatmawati,2012:2)

Peran pemerintahan daerah dalam mendukung perekonomian di era pandemi covid-19 sangat diperlukan. Ditengah pandemi covid-19 pemerintahan daerah diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi nasional, khusus nya pada daerah Jambi,

Pandemi covid-19 ini mengguncang perekonomian indonesia, termasuk di daerah provinsi jambi, Provinsi jambi merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari covid 19, Jumlah penderita yang terkena covid-19 Desember 2020 38.843, serta 896 orang meninggal, 73 orang masih dirawat (positif aktif), dan 37.874 orang dinyatakan sembuh.

Kota Jambi menjadi kota dengan angka kasus infeksi terbanyak di Provinsi Jambi yaitu 5.065 orang, sedangkan Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten dengan jumlah kasus infeksi tertinggi di seluruh Provinsi Jambi yaitu 2.416 kasus. Kota Jambi juga merupakan kota dengan jumlah meninggal terbanyak di Provinsi Jambi yaitu 99 pasien, sedangkan Kabupaten Batang Hari menjadi kabupaten dengan jumlah meninggal tertinggi di Provinsi Jambi yaitu 48 orang.

Terdapat 11 kota dan kabupaten dengan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 terbanyak di Provinsi Jambi, seperti berikut ini.

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Yang Terinfeksi Covid-19 Provinsi Jambi

Nama	Positif	Sembuh	Meninggal	Proses
Batanghari	3,165	3,048	114	3
Bungo	2,077	2,046	31	0
Kerinci	590	564	22	4
kota jambi	9,738	9,482	254	2
Merangin	1,679	1,585	94	0
muaro jambi	4,131	4,060	68	3
Sarolangun	1,036	1,027	9	0
sungai penuh	1,408	1,388	20	0
tanjab barat	2,419	2,353	63	3
tanjab timur	1,406	1,370	36	0
Tebo	2,137	2,067	31	39

Sumber : <https://corona.jambiprov.go.id>

Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk secara independen menciptakan peraturan lokal, merencanakan dan menerapkan kebijakan, serta mengatur keuangan wilayahnya. Otonomi daerah bertujuan untuk

mempercepat perkembangan ekonomi dan juga pembangunan di daerah, meminimalisir ketimpangan tiap wilayah, serta meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik yang ada di setiap daerah (Septariani & Asoka, 2022). Salah satu aspek pemerintahan daerah yang perlu diatur dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan penganggaran daerah, karena APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Menurut aturan pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh daerah terkait rangka menjalankan tugas pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan nilai uang, serta semua jenis kekayaan yang bisa dimiliki oleh daerah dalam kaitannya tentang hak dan kewajiban daerah tersebut.

Kuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah serta pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut (Halim & Kusufi, 2018). Sehubungan dengan hal ini, keuangan daerah menjadi bagian yang sangat perlu untuk di perhitungkan secara matang karena menjadi tonggak dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahun guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan makasimal. Pencatatan, pengukuran, penilaian, dan pencapaian pengelolaan keuangan daerah dapat dimonitor melalui kinerja keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2019). Apabila kinerja keuangan

pemerintah daerah dijalankan dengan baik dan benar maka akan baik juga dalam hal pengendalian keuangannya, baik dalam hal pengendalian pendapatan maupun belanjanya yang dilakukan oleh daerah tersebut. Oleh karenanya, kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki urgensi untuk diteliti karena akan berdampak bagi pemerintah daerah dan para pengguna lainnya yang memerlukan informasi mengenai hal ini.

Hal-hal yang menjadi fenomena pada penelitian ini adalah adanya penurunan APBD, serta pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren penurunan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia di awal Tahun 2020 yang kemudian mempunyai dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Salah satunya pendapatan asli daerah di kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terlihat dalam kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2020. Kajian tersebut menggambarkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kabupaten/kota Provinsi Jambi tidak stabil, sebagai gambaran realisasi pendapatan asli daerah kota Jambi yang pada Tahun 2019 menunjukkan 393,43 miliar turun cukup jauh menjadi hanya 355,67 miliar. Penurunan ini terjadi karena adanya penutupan pemasukan PAD yang berada di daerah, serupa tempat pembayaran pajak kendaraan, hotel, kafe, restaurant, ataupun tempat wisata, terutama di Kota Jambi yang sebagai kontributor paling besar PAD. Hal ini menunjukkan jika daerah di masih sangat mengharapkan pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah pusat karena Provinsi Jambi memiliki

keterbatasan dalam objek pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, potensi pajak dan retribusi daerah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Realisasi dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jambi juga menunjukkan hal yang sama yaitu cenderung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Tertuang di kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi 2020 bahwa hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan realisasi dana perimbangan, sebagai gambaran pada Kabupaten Muaro Jambi realisasi dana perimbangan pada tahun 2019 mencapai 1045,45 miliar dan turun pada tahun 2020 yang hanya menjadi 857,50 miliar. Penurunan realisasi pada dana perimbangan juga diakibatkan oleh wabah Covid-19 selama Tahun 2020 yang berdampak kepada menurunnya APBN pemerintah pusat dan kemudian berdampak kepada penurunan dana transfer dari pusat ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya.

Kajian fiskal regional DJPB Tahun 2020 juga memperlihatkan bahwa realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi rata-rata memperlihatkan adanya tren penurunan pada Tahun ini yang disebabkan oleh pandemi wabah covid-19. Rendahnya serapan belanja ini sangat memengaruhi keadaan perekonomian suatu daerah yang paling utama adalah tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam konteks pengendalian keuangan pemda, belanja modal dianggap jadi indikator produktivitas penggunaan anggaran. Tujuan dari penggunaan anggaran belanja modal adalah untuk memperbaiki dan

meningkatkan fasilitas publik serta menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi dikutip dari kajian fiskal regional kementerian keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi (2020), menyatakan bahwa pada tahun 2020 Provinsi Jambi ini mempunyai misi pengembangan di Tahun 2020 dengan topik “peningkatan daya saing daerah dengan memacu kualitas produk unggulan daerah”. Topik ini diangkat akibat adanya tren laju pertumbuhan ekonomi terus melamban serta melemahnya daya saing produk lokal guna berkompetisi dengan produk lainnya selain itu, terlihat adanya kontribusi yang rendah dari sektor industri, yang tercermin dalam penurunan partisipasi sektor tersebut terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, sebagai gambaran pada Kota Jambi sendiri di Tahun 2019 menunjukkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 4,73% dan merosot pada tahun berikutnya menjadi 3,96%, data angka pertumbuhan ekonomi yang menurun ini diakibatkan oleh timbulnya pandemi covid-19 mengakibatkan lambatnya konsumsi daripada rumah tangga, ekspor, serta investasi yang diakibatkan turunnya aktivitas ekonomi guna meminimalisir semakin tersebarnya virus covid-19.

Berdasarkan fenomena yang terjadi tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

“ Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Sebelum Dan Sesudah COVID-19 (Study Kasus Pada Pemerintahan Daerah Jambi)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Jambi Sebelum dan selama pandemi?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Jambi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

1.4 Manfaat penelitian

1). Bagi penulis

- a. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari dibangku kuliah
- b. penulis dapat mengetahui kondisi keuangan pemerintahan daerah jambi yang dilihat dari tingkat rasio keuangan.
- c. penulis dapat mengetahui perkembangan keuangan pemerintahan daerah jambi.

2). Bagi pemerintahan daerah

a. memberikan tambahan informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui perkembangan keuangan berdasarkan analisis kinerja keuangan.

b. memberikan bantuan kepada pemerintahan daerah untuk mengetahui dan memahami kondisi keuangan.

3). Bagi perguruan tinggi

Sebagai bahan referensi tambahan yang akan melakukan penelitian khusus nya mengenai analisis kinerja keuangan



